

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Signalling Theory*

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dijelaskan dengan teori sinyal. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal–sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal.

Teori signal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan.

Pada *signalling theory*, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham perusahaan (Kusuma, 2006).

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan perusahaan. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikan di tempat lain. Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada kemampuan perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

Hubungan baik akan terus berlanjut jika pemilik ataupun investor puas dengan kinerja manajemen, dan penerima signal juga menafsirkan signal perusahaan sebagai signal yang positif. Hal ini jelas bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang krusial dalam hubungan antara manajemen dengan pemilik ataupun investor.

2.2 Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2006:31) adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari beberapa indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa Neraca, laba-rugi, arus kas, dan perubahan modal secara bersamaan memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Selain itu dapat diukur juga dengan rasio-rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio laporan keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu.

Kinerja perusahaan juga bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain seperti *Market share growth*, *Return on Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *ROI Growth*, *Return On Sales (ROS)*, *ROS Growth Asset*, *Price Earning Ratio*, *Tobin's Q*, dan rasio-rasio keuangan lainnya (Purno, 2013).

Alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. ROA rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset diawal tahun fiskal. ROA mengukur

pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam).

ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. ROA digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba-rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha (Ayu, 2022)

Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, setiap unit yang ada dalam organisasi perusahaan dapat menggunakan ROA untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan.

ROI (*Return of Investment*) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan investasi. Definisi mengenai ROI terdapat beberapa pendapat, seperti oleh Rainer, et al (2013) menjelaskan bahwa ROI sebagai sebuah alat ukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan asset yang tersedia. ROI adalah sebuah persentase, dimana semakin tinggi persentase yang dikembalikan akan semakin baik. Return On Investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui secara keseluruhan dalam menghasilkan seberapa

besar *Return On Investment* (ROI). Semakin tinggi *Return On Investment* (ROI), semakin efisien modal/dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang sering digunakan untuk membandingkan kemampuan manajemen modal perusahaan dengan kompetitor dari industri yang sama. Hal ini karena ROE mampu memberikan indikasi yang akurat terkait perusahaan mana yang lebih efektif dalam mengelola modalnya untuk dapat menghasilkan keuntungan. Lebih lanjut Almira & Wiagustini (2020) menjelaskan bahwa ROE merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba bersih. (Muhani et al., 2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi ROE maka tingkat pengembalian investasi akan semakin tinggi.

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Semakin kecil PER suatu saham maka akan semakin baik sehingga bisa disimpulkan bahwa rasio PER memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap harga saham *Price to Earning Ratio* (PER) dapat juga disimpulkan sebagai bagian dari Analisa Fundamental yang merupakan Rasio dalam menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Darmadji & Fakhrudin (2001) menjelaskan bahwa PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam formulasi perhitungan *Price to Earning Ratio* (PER) memasukkan unsur *Earning per Share* (EPS) atau laba bersih per saham dimana merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Semakin tinggi nilai EPS maka semakin menarik investor karena semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi alat ukur kinerja yang digunakan adalah Return on Asset (ROA). Menurut Dendawijaya (2015:118) rasio return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA merupakan salah satu indikator

keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Pandia, 2012:45). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan.

Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham dan berdampak pada pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari deviden yang diterima juga meningkat. Sehingga ROA yang meningkat akan menjadi daya tarik bagi para investor dan atau calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Jika permintaan atas saham bank semakin banyak maka harga saham bank tersebut di pasar modal cenderung meningkat.

Menurut Dendawijaya (2015:118) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus ROA sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

2.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Munawir (2012) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada bidang pertambangan maka ruang lingkungannya berbeda dengan perusahaan di bidang pertanian. Begitu juga dengan perusahaan transportasi yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya.

2.2.3 Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2012), ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara umum yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lain. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu :
 - a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.
4. Melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.3 Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. *Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam penerapan *good corporate governance* terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar GCG dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum ada lima prinsip dasar dalam GCG menurut KNKG (2006), yakni: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam hal ini, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam hal ini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan seperti *insider trading*, *fraud*, dilusi saham, KKN, dll.

2.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Suatu perusahaan yang ingin menuai manfaat dari pasar modal atau jika ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung tercapainya hal tersebut. Penerapan prinsip dan praktik GCG akan meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri (2017) menjelaskan bahwa manfaat dari GCG dalam perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang ditanggung perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini atau dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya suatu perusahaan sekaligus pilar untuk memenangkan persaingan di era global.

2.3.3 Faktor-Faktor *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaannya, *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan, seperti terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja di perusahaan, adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, adanya sistem audit yang efektif, adanya keterbukaan informasi bagi publik dll.

Adapun faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin supremasi hukum yang konsisten dan efektif, adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

2.3.4 Sistem *Good Corporate Governance*

Secara umum terdapat 2 struktur kepengurusan perusahaan yakni *one tier board system* dan *two tier board system*. Pada perusahaan di Indonesia, umumnya menganut *two tier board system* yang dimana terdiri dari dewan komisaris serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan terpisah dari dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan. Menurut Bacon dan Brown dalam Daniri (2005), ada 3 karakteristik utama *two tier board system*, yaitu:

1. Struktur *two tier board system* memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan (dewan direksi) dengan dewan pengawas perusahaan (dewan komisaris).
2. Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat menghindari campur tangan dan tugas ganda
3. Dalam *two tier board system* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya.

Pengawasan dalam perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuknya. Pada *two tier board system* semua komite diciptakan sebagai wahana penyeimbang bagi perusahaan untuk menjamin perusahaan bisa dikelola dengan baik, efektif dan profesional.

2.3.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. Menurut (Mahrani & Soewarno, 2018), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya :

Mekanisme Eksternal

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Mekanisme Internal

Mekanisme ini menurut Hatane et al (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi:

1. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan monitoring terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan perlu adanya pembatasan agar peran masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan untuk mengawasi manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan stakeholder.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Untuk mengukur kepemilikan manajerial yaitu dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah meningkatkan kepemilikan saham manajemen.

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan serta memastikan bahwa good corporate governance telah berjalan baik. Kedudukan anggota dewan komisaris setara dengan komisaris utama.

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Komite audit memiliki peran penting dan dianggap sebagai penghubung antara investor dan

dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.4 Kepemilikan Institusional

Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2017). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional

yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan.

Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyalurkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional. Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2017). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Sulistiani, 2015).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak

manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan.

Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2015:2). Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Nuraini, 2014:17). Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut (Permanasari, 2014):

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

2.4.1 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, 2016:177). Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury, 2016: 35):

$$\text{INST} = \text{Jumlah saham yang dimiliki institusi} / \text{Jumlah saham yang beredar}$$

2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015).

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan

keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntunganbagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.

Ni Putu (2016) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut agency conflict. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa (Brigham, 2014):

- a) pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen,
- b) pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan
- c) biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut managerial ownership.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan berindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk menikatakankinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham

2.5.1 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan returnbahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debt yang dimiliki perusahaan (Brailsford, 2014). Debt yang tinggi akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahaan akan mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha menekan jumlah debt serendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor.

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase (Putu, 2016). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi

kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Pujiati, 2015). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus:

$$\text{MNJR} = \text{Jumlah Saham manajer} / \text{Jumlah saham yang beredar}$$

2.6 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen sebagai berikut : “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016), menjelaskan bahwa peranan *Board of Directors* (BOD) sebagai *the governing body* untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk 14 mendorong diterapkannya *good corporate governance*.

Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.

2.6.1 Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut : “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan : PDKI: Proporsi Dewan Komisaris Independen

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan.

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan PDKI= x 100% 21 pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan

Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

2.7 Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Peraturan Menteri BUMN no. Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN. Tugas Komite Audit telah tertuang pada Piagam Komite Audit yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT IPC Terminal Petikemas sejak 1 November 2017, yang dapat dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi :

- Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
- Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk di sampaikan pada RUPS;

- Komite Audit menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Komite Audit melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan;
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

2.7.1 Tujuan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen dan /atau pihak dari luar perusahaan efek. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada Securities and Exchange Commission (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam charter komite auditnya, bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi:

- 1) Integritas dari laporan keuangan perusahaan.
- 2) Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal.
- 3) Kinerja dari auditor internal dan auditor eksternal perusahaan.
- 4) Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit terkait pada batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal yang spesifik yang telah memperoleh hak suara eksplisit dari dewan komisaris, misalnya ialah mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

2.7.2 Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, membuat laporan 27 tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Buallay (2018); DeZoort et al., (2002) menetapkan frekuensi pertemuan sebagai evaluasi audit due diligence komite. Frekuensi pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana, 2014). Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Dhimas Haryolaksito, 2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Masuk Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2014-2016	Hasil pengujian menemukan bahwa komisaris independen tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Bahkan hasil menunjukkan sebaliknya dimana komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka semakin turun kinerja perusahaan. Variabel ukuran dewan direksi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan institusi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan saham institusi maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti kinerja perusahaan tidak disebabkan oleh besar kecilnya ukuran perusahaan.
2.	(Faisal Rizky Wardana, Komar Darya, 2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa	Hipotesis pertama didalam penelitian ini adalah Komite Audit Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ditunjukkan oleh nilai probabilitas KA sebesar 0.7094. angka tersebut lebih besar dari pada tingkat

	Efek Indonesia Tahun 2017-2019	<p>signifikansi ($\alpha = 0.05$). penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Nadya Ayu Saputri , Rochmi Widayanti, Ratna Damayanti (2019), Rimardhani, dkk (2016) yang mengemukakan bahwa Komite Audit yang tidak berpengaruh signifikan.</p> <p>Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Ditunjukkan oleh nilai probabilitas KI sebesar 0.3754. angka tersebut lebih besar dari pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$). penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lavenia Dewi, Ida Bagus Badjra (2017), bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2017) bahwa tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan Komisaris Independen terhadap ROA.</p> <p>Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ditunjukkan</p>
--	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			oleh nilai probabilitas KM sebesar 0.0015. angka tersebut lebih kecil dari pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$). penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017- 2019.
3.	(Inka Novitasari, I Dewa Made Endiana, Putu Edy Arizona, 2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. 3) Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. 4) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. 5) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018.
4.	(Nuriya Anaima, Sri Trisnarningsih, 2021)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol	Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka ditemukan beberapa kesimpulan yaitu pengaruh signifikan secara simultan variabel efektivitas komite audit dan proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Secara parsial proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan intensitas pertemuan komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan

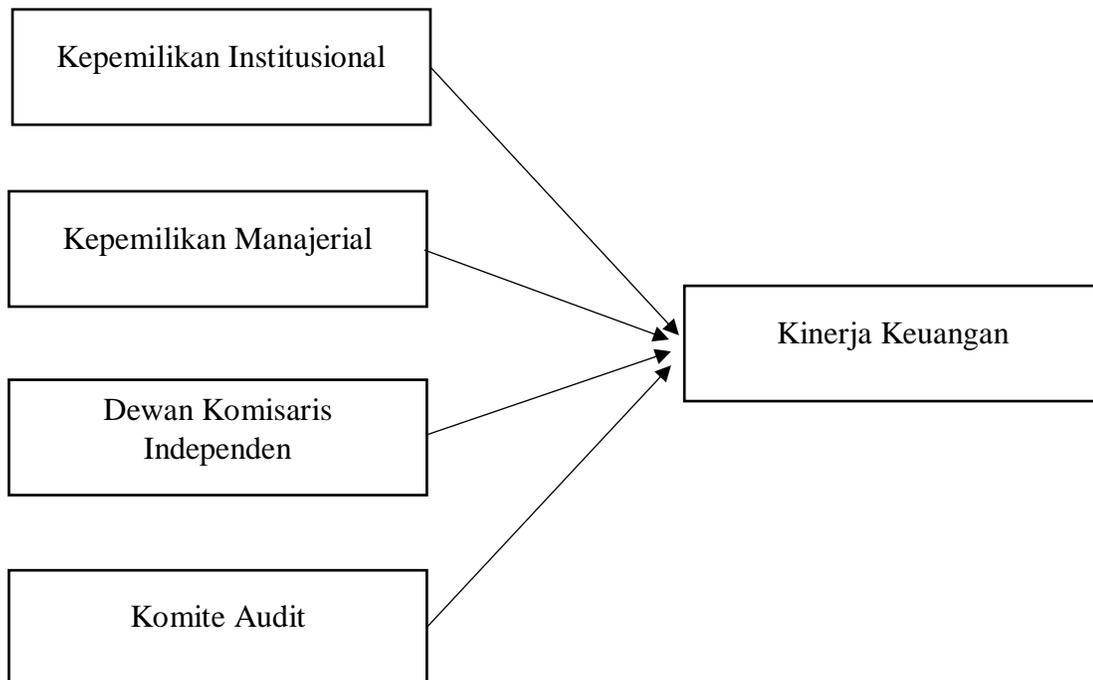
			terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pemaparan diatas terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan atau mengganti dengan variabel baru yang berpotensi berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan, mencoba menggunakan teknik analisis yang berbeda, menggunakan sampel perusahaan yang berbeda, serta menambah rentang periode penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas.
5.	(Wida Arindya Sari, 2021)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perbankan 2. Secara parsial variabel kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Namun untuk variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional dihitung berdasarkan jumlah besar saham yang dimiliki suatu institusi terhadap jumlah total saham beredar. Kepemilikan institusional mampu bekerja secara profesional dalam mengontrol kinerja manajer yang melakukan pengembangan investasi. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien penggunaan sumber daya perusahaan dan tindakan pencegahan akan diambil terhadap

manajemen (Faisal, 2005). Kepemilikan institusional dapat mengontrol manajemen melalui proses pemantauan yang efektif untuk lebih fokus pada kinerja bisnis. Sejalan dengan penelitian Gunarsih (2017) yang hasil penelitiannya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Peneliti (Wardhana, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan.

2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

Peneliti (Sari, 2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

2.10.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan

membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan Perseroan yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti (Sari, 2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh antara variabel komite audit terhadap kinerja keuangan.